

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pondok Pesantren

##### 1. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah gabungan dari kata pondok dan pesantren. Kata pondok berasal dari bahasa Arab yaitu *funduk* yang berarti rumah penginapan atau hotel. Secara umum istilah pondok digunakan untuk menyebutkan bangunan sederhana sebagai tempat tinggal sementara. Di Indonesia khususnya pulau Jawa, pondok lebih dimaknai sebagai perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam bentuk kamar-kamar yang merupakan asrama bagi santri.<sup>20</sup>

Pesantren berasal dari kata *shastri* yang dalam bahasa India artinya orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu.<sup>21</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikutip Amin, menyebutkan kata pesantren berasal dari kata santri, sehingga bisa menjadi kata pesantrian atau yang lebih dikenal dengan pesantren. Kata pesantrian yang diimbuhi pedan akhiran -an yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Dimana kata pesantren berarti asrama

---

<sup>20</sup> Moh. Wardi, "Pengembangan Entrepreneurship Berbasis Experiential Learning Di Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Dan Darul Ulum Banyuwang Pamekasan" (Disertasi Doktor, Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 88.

<sup>21</sup> Hariadi, *Evolusi Pesantren: Studi Kepemimpinan Kiai Berbasis Orientasi ESQ* (Yogyakarta: LkiS, 2015), 10.

tempat santri atau tempat murid-murid mengaji atau bisa diartikan sebagai pondok.<sup>22</sup>

Pondok pesantren sendiri menurut Khamim adalah institusi keagamaan yang memberikan pendidikan dan pegajaran serta pengembangan dan penyebaran ilmu agama Islam.<sup>23</sup> Hariadi menerangkan bahwa kenyataan yang didapat dalam kehidupan sekarang, pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam tertua yang telah berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim di Indonesia.<sup>24</sup> Menurut M. Dawam Raharjo pesantren bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya pendidikan tetapi juga sebagai penyiaran agama Islam.<sup>25</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam tertua sebagai pusat dakwah dan pengembangan masyarakat muslim melalui pemberian pendidikan dan pengajaran ilmu agama Islam.

## 2. Unsur-unsur Pondok Pesantren

Menurut Mustajab, perbedaan pondok pesantren di Jawa dapat dilihat dari segi ilmu yang diajarkan, jumlah santri, tipe kepemimpinan kiai ataupun perkembangan ilmu teknologi. Namun

---

<sup>22</sup> A. Rifqi Amin, *Pengembangan Pendidikan Islam: Reinterpretasi Berbasis Interdisipliner* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), 195.

<sup>23</sup> Khamim, *Mengkaji Hadis Di Pesantren Salaf* (Kediri: Stain Kediri Press, 2015), 1-2.

<sup>24</sup> Hariadi, *Evolusi Pesantren.*, 9-10.

<sup>25</sup> M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* (Jakarta : P3M, 1985), VII.

demikian, terdapat lima unsur pokok pada pondok pesantren, yaitu santri, kiai, pondok, tempat belajar, dan kitab Islam klasik.<sup>26</sup> Selanjutnya uraian dari lima unsur pokok tersebut menurut Hariadi adalah sebagai berikut:

1) Kiai

Kiai adalah tokoh sentral dan esensial dalam lembaga pesantren, karena dialah perintis, pendiri, pengelola, pengasuh, pemimpin dan terkadang juga pemilik tunggal sebuah pesantren. Kiai yang dimaksud disini merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik pada santrinya.

2) Santri

Dalam masyarakat sebutan santri adalah golongan orang muslim shaleh yang memeluk agama Islam dengan sungguh-sungguh dan teliti dalam menjalankan perintah-perintah agamanya. Pengertian tersebut membedakan dengan istilah kelompok abangan yang diberikan pada orang Islam yang kurang memahami ilmu agama Islam. Sedangkan yang dimaksudkan disini santri adalah

---

<sup>26</sup> Mustajab, *Masa Depan Pesantren: Telaah Atas Model Kepemimpinan Dan Manajemen Pesantren Salaf* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2015), 57-58.

seseorang yang menuntut ilmu di pesantren atau yang telah menuntut ilmu di pesantren.

3) Masjid

Masjid adalah sebuah bangunan yang secara harfiah difungsikan sebagai tempat sujud ataupun tempat peribadatan orang muslim. Namun dalam konteks pesantren, selain sebagai tempat ibadah, masjid juga digunakan sebagai pusat pendidikan, pengajaran dan pembinaan watak para santri.

4) Pondok

Pondok merupakan tempat tinggal bagi seorang di pesantren. Didalamnya selalu ada interaksi antara seorang kiai dan santri. Jadi pondok bisa ditunjukan pada tempat tinggal seorang santri dan kiai, meskipun kiai memiliki rumah sendiri dalam lingkup pondok.

5) Pengajaran ilmu-ilmu keislaman

Berbeda dengan mustajab yang menyebutkan unsur pesantren langsung kitab Islam klasik, Hariadi menyebutkan pengajaran ilmu-ilmu keislaman. Karena di pesantren meskipun umumnya menggunakan kitab-kitab Islam klasik yang berbahasa Arab, namun ada juga

pesantren (pesantren modern) yang dalam pengajarannya ada kitab tidak tergolong kitab klasik.<sup>27</sup>

Namun demikian, menurut Wardi terdapat variasi/pola dan karakteristik pesantren, antara lain:

a) Pola 1: masjid dan rumah kiai

Pesantren ini bersifat sederhana, dimana kiai menggunakan masjid atau rumahnya sebagai tempat mengajar dan santrinya berasal dari daerah pesantren itu sendiri.

b) Pola II: masjid, rumah kiai, dan pondok

Dalam pola ini pesantren telah memiliki pondok sebagai tempat tinggal santri dari berbagai daerah ataupun yang memang ingin tinggal di pondok.

c) Pola III: masjid, rumah kiai, pondok, madrasah

Dalam pola ini santri yang mondok sudah mendapatkan fasilitas tempat belajar di madrasah atau sekolah.

d) Pola IV: masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat ketrampilan

---

<sup>27</sup> Hariadi, *Evolusi Pesantren.*, 18-35.

Dalam pola ini, selain belajar di madrasah, santri juga diberi tempat untuk mengembangkan ketrampilan dirinya.

- e) Pola V: masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat ketrampilan, gedung pertemuan, sekolah umum

Pesantren dalam pola ini sudah berkembang dan masuk kategori mandiri atau bisa disebut juga dalam pesantren modern. Karena selain santri mendapatkan pengetahuan agama dan ketrampilan, santri juga mendapat pengetahuan umum.<sup>28</sup>

### 3. Fungsi Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang memerankan fungsi sebagai institusi sosial.<sup>29</sup> Sebagai institusi sosial pesantren memiliki dan menjadi pedoman etika bagi masyarakat, karena pesantren adalah institusi yang melegitimasi berbagai moralitas yang seharusnya ada dalam masyarakat. Karena institusi sosial pada hakekatnya muncul dan berkembang berkat tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai institusi sosial tersebut, fungsi pondok pesantren meliputi: (1) sebagai sumber nilai dan moralitas, (2) sebagai pendalaman nilai dan ajaran keagamaan, (3) sebagai pengendali-filter bagi

<sup>28</sup> Wardi, Pengembangan Entrepreneurship., 89-90.

<sup>29</sup> Nur Syam, Kepemimpinan Dalam Pengembangan Pondok Pesantren Dalam A. Halim Dkk. (Ed.), Manajemen Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 78.

perkembangan moralitas dan kehidupan spiritual, (4) sebagai perantara berbagi kepentingan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, dan (5) sebagai sumber praksis dalam kehidupan.<sup>30</sup> Dalam tulisannya yang lain disebutkan juga fungsi pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat.<sup>31</sup> Diatas segalanya, pondok pesantren memainkan peran sebagai lembaga dakwah.<sup>32</sup>

Fungsi pondok pesantren adalah sebagai lembaga pengembangan masyarakat termasuk pengembangan ekonomi umat. Tidak sedikit santri pondok pesantren yang berhasil mengembangkan usaha dibidang agrobisnis dan agroindustri, serta bidang jasa, sehingga mampu menunjang biaya pendidikan, khususnya bagi santri yang tidak mampu. Bahkan ada yang telah mampu memberdayakan ekonomi umat sekitar pondok pesantren.<sup>33</sup>

#### 4. Peran Pondok Pesantren

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.<sup>34</sup> Hal yang umum dilakukan oleh pondok pesantren adalah pemberdayaan

---

<sup>30</sup> Ibid., 79.

<sup>31</sup> Nur Syam, Pengembangan Komunitas Pesantren Dalam Moh. Azis Dkk. (Ed.), *Dakwah Pemberdaya Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 121-131.

<sup>32</sup> Yusuf Hasyim, Peranan Dan Potensi Pesantren Dalam Pembangunan Dalam Manfred Oepen Dan Wolfgang Karcher, (Ed.), *Dinamika Pesantren: Dampak Pesantren Dalam Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat*, Terj. Sonhaji Saleh (Jakarta: P3m, 1988), 91.

<sup>33</sup> Mohammad Arif, *Pesantren Salaf Basic Pendidikan Karakter* (Kediri : Stain Kediri Press, 2012), 83.

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 667.

terhadap para santri, biasanya dengan memberikan pengetahuan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan.

Pemberdayaan masyarakat yang meliputi seluruh dimensi kehidupan masyarakat di sekitar, merupakan tanggung jawab sosial pondok pesantren sesuai dengan ajaran islam sendiri. Pesantren dalam pembangunan masyarakat pedesaan, yaitu pesantren sebagai lembaga pendidikan, pesantren sebagai pusat pengkaderan muslim, dan pesantren sebagai agen perubahan.<sup>35</sup>

Fungsi dan peran pesantren sebagai agen perubahan sosial tampak ketika terjadi proses perubahan dilingkungan masyarakat pedesaan, kiai dan pesantrenya memiliki posisi sentral yang mampu mendorong mereka melakukan tindakan kolektif. Selain itu, kiai dan pesantren terlibat secara aktif dalam program-program pemberdayaan masyarakat pedesaan, sehingga pesantren dapat diidentikan sebagai lembaga yang populis dan peka terhadap program-program pemberdayaan masyarakat.<sup>36</sup>

## **B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti.<sup>37</sup> Secara konseptual, pemberdayaan berasal

---

<sup>35</sup> Irwan Abdulah, Dkk, *Agama Pendidikan Islam Dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 4.

<sup>36</sup> In'am Sulaiman, *Masa Depan Pesantren* (Malang : Madani Wisma Kalimetro, 2010), 7.

<sup>37</sup> Nanih Machendrawati Dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pembangunan Masyarakat Islam: Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2001), 41.

dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan.<sup>38</sup> Sedangkan pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata *daya* yang berarti *upaya, usaha, akal, dan kemampuan*.<sup>39</sup> Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk melakukan mengembangkannya.

Pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi yaitu *Pertama*, kesadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang ditimbulkan serta kesulitan hidup atau penderitaan. *Kedua*, meningkatkan sumber daya yang telah ditemukan, pemberdayaan memerlukan upaya advokasi kebijakan ekonomi politik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka akses golongan bawah, lemah, dan tertindas tersebut terhadap sumber daya yang dikuasai oleh golongan kuat atau terkungkung oleh peraturan pemerintah dan pranata sosial.<sup>40</sup>

Menurut Kartasmita, sebagaimana yang dikutip oleh Sulistiati yaitu, Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendonamisasi potensi-potensi masyarakat dalam rangka

---

<sup>38</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Reflika Aditama, 2005), 57.

<sup>39</sup> Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), 317.

<sup>40</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 355.

meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.<sup>41</sup>

Tentang masyarakat yang berdaya guna dalam kehidupannya, Allah SWT berfirman :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ نُؤْتِي أُولَئِكَ كُلَّ حِينٍ بَأْذَنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.” (QS.Ibrahim: 24-25).<sup>42</sup>

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam:

<sup>41</sup> Sulistiati, *Isu-Isu Pembangunan Sosial.*, 229.

<sup>42</sup> Hasbi Ashshiddiqi, Et. Al., *Al Qur'an Dan Terjemahnya* ., 383-384.

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kemiskinan ilmu.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>43</sup>

Konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala

---

<sup>43</sup> Badri Khaeruman, *Islam Dan Pemberdayaan Umat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2005), 299.

struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

- 3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisioanal ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsiten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.<sup>44</sup>

## 2. Tujuan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah yang lebih baik secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pemberdayaan dilakukan untuk memperluas pilihan masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

---

<sup>44</sup> Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1999),15.

<sup>45</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan, Masyarakat Dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran Dan Pendekatan Praktis* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ui, 2003), 32.

### 3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses intervensi sosial (perubahan sosial yang terencana). Adapun proses tahapan pemberdayaan menurut Adi, yakni<sup>46</sup> :

Pertama, Tahap Persiapan. Tahapan ini meliputi penyiapan petugas (*community development*), dimana tujuan ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubahan (*agen of change*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.

Kedua, Tahap *Assesment*. Tahap pengkajian dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan kelompok sasaran sehingga menemukan kebutuhan apa yang mereka rasakan (*felt needs*) dan juga sumber apa yang mereka miliki.

Ketiga, Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan. Pada tahap ini agen perubahan (*agent of change*) secara partisipatif melibatkan warga untuk merumuskan masalah yang mereka hadapi beserta solusi yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

---

<sup>46</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan, Masyarakat.*, 179-196.

Keempat, Tahap Pemformulasian Rencana Aksi. Pada tahapan ini, peran *agent of change* adalah membantu sasaran untuk menuliskan rumusan program mereka dalam format yang layak untuk diajukan kepada penyandang dana.

Kelima, Tahap Pelaksanaan (*implementasi*) Program. Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antar warga.

Keenam, Tahap Evaluasi. Yakni proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan warga.

Ketujuh, Tahap Terminasi. Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Pemutusan hubungan dengan komunitas sasaran ini sebaiknya dilakukan secara pelan-pelan, bertahap, tidak secara langsung ditinggalkan begitu saja oleh *agent of change*, sehingga dapat dipastikan ketika agen perubahan ini keluar dari komunitas tersebut, keadaan akan jauh berubah dan komunitas sasaran sudah relatif mandiri.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid., 179-196.

#### 4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang “penting” yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan. Dalam Islam, strategi pemberdayaan berarti mengembangkan sistem dari umat, oleh umat dan untuk kepentingan umat.

Strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu :

- a. Pemilihan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Penetapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat
- c. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Mengacu kepada Korten, Sumaryadi mengemukakan adanya lima generasi strategi pemberdayaan, yaitu *Pertama* :

generasi yang mengutamakan *relief and welfare*, yaitu strategi yang lebih mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan setiap individu dan masyarakat, seperti : sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. *Kedua* : *strategy community development* atau *small scale reliant local development*, yang lebih mengutamakan pada kesehatan, penerapan teknologi tepat-guna, dan pembangunan infrastruktur. *Ketiga* : generasi *sustainable system development*, yang lebih mengharapkan terjadinya perubahan pada tingkat regional dan nasional. *Keempat* : merupakan generasi untuk mengembangkan gerakan masyarakat (*people movement*), melalui pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan lokal, serta mobilisasi sumberdaya lokal yang ada dan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. *Kelima*, generasi pemberdayaan masyarakat (*empowering people*) yang memperhatikan arti penting perkembangan, teknologi, persaingan, dan kerjasama.<sup>48</sup>

Dalam strategi pemberdayaan masyarakat terdapat 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu<sup>49</sup> :

- 1) Motivasi: dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan

---

<sup>48</sup> Totok Mardikanto Dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung, Alfabeta, 2013), 169-170.

<sup>49</sup> Ibid., 170-171.

kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

- 2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan: peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif.
- 3) Manajemen diri: setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat.
- 4) Mobilisasi sumberdaya: untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial.
- 5) Pembangunan dan pengembangan jejaring: pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya dalam membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya.

## 5. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat, yaitu: meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.<sup>50</sup>

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2014) menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, adapun indikatornya sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Winda Pristian Irawan, “Pengaruh Program Pemberdayaan Di Sektor Ekonomi Terhadap Pengembangan Mustahik Oleh Rumah Zakat Di Wilayah Bekasi” (Skripsi S1 Fajultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 37-38.

<sup>51</sup> Rosni , “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”, *Geografi* Vol. 9 No. 1 , (2017), 58-59.

1. Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).

2. Keluarga Sejahtera I (KS I)

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga. Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/pergi/bekerja/ sekolah.
- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan
- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan kontrasepsi.
- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

### 3. Keluarga Sejahtera II (KS II)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*develomental needs*) dari keluarga.

Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II), meliputi:

- a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
- b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging/ikan/telur.
- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- d. Luas lantai paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni.
- e. Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan
- f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- g. Anggota keluarga umur 10 - 60 bisa, bisa baca tulis latin.
- h. Pasangan Usia Subur (PUS) dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.

4. Keluarga Sejahtera III (KS III)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.

Indikator keluarga sejahtera tahap III, meliputi:

- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang.
- c. Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
- d. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
- e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/TV/radio.

5. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III +)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus. Indikator keluarga sejahtera tahap III Plus, meliputi:

- a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
- b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan sosia/yayasan/institusi masyarakat.

Indikator sejahtera menurut Islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari *rizqi* yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahma*, rasa cinta kasih sesama, *ridha* dan *qanaa'ah* dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia.<sup>52</sup>

Menurut Imam Abu Ishak Al-Syatibi, *Maqashid al-Syari'ah* yang tertuang dalam karyanya, yaitu :<sup>53</sup>

هذه الشريعة و ضعت لتحقيق مقاصده الشارح قيام مصالح في الدين  
الدنيا معا

“syariah ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di akhirat dan dunia”.<sup>54</sup>

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu

<sup>52</sup> Rohma Vihana Enggardini, " Kesejahteraan karyawan perspektif Maqashid Syariah pada pusat Penelitian kopi Dankakao, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol. 4 No. 8 Agustus 2017, 602.

<sup>53</sup> Imam Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkām* (ttp: Dar al-Rasyā al-Hadisah, t.th), juz. II, 2.

<sup>54</sup> Suyitno, *Maqhasid As-Syariah dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat, Muaddib* Vol.05 No.01 (Januari-Juni 2015), 76.

sendiri. Syathibi kemudian membagi masalah ini kepada tiga bagian penting yaitu :<sup>55</sup>

1. *Dharuriyyat* (primer), *Maqashid* atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. *Dharuriyyat* adalah segala sesuatu yang apabila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan. Ini terkait dengan empat hal: ibadah, adat, *muamalat* dan *jinayat*. Ibadah mengacu mempertahankan agama, adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal misalnya makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. *Muamalat* mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal. Sedangkan *jinayat* mengacu kepada amar ma'ruf nahi mungkar.<sup>56</sup>
2. *Hajiyyat* (skunder) berada sedikit di bawah level *dharuriyyat*, yaitu segala sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan hak yang dimaksud, tapi tidak sedemikian darurat. Berbeda dengan *dharuriyyat*, jika *hajiyyat* tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi, kendatipun sangat lemah. *Hajiyyat* berlaku pada Ibadah, seperti dispensasi bagi orang sakit yang tidak berpuasa

---

<sup>55</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)", *Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Volume: I, Issue I ( Desember 2014 ), 54.

<sup>56</sup> Ibid, 54.

dibulan romadhon, adat seperti diperbolehkanya berburu dan mengkonsumsi makanan yang halal. Muamalat, seperti jual beli, penanaman modal dan semacamnya. *Jinayat*; mengenakan denda bagi pembunuh yang berakal. Contoh jenis maqasid ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.<sup>57</sup>

3. *Tahsiniyyat* (tersier) adalah hal-hal yang tidak bisa mendesak dan tidak sangat penting bagi perlindungan hak. Namun jika terpenuhi *tahsiniyat* akan menyempurnakan hak-hak yang lain. Contoh jenis al-maqasid ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan.<sup>58</sup>

Yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu:

---

<sup>57</sup> Ibid, 55.

<sup>58</sup> Ibid, 55.

1. Memelihara agama (*Hifdzud Din*). Memelihara agama merupakan tujuan utama hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Di dalam agama terkandung unsur akidah bagi setiap muslim. Selain itu terdapat unsur syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim dalam hubungannya dengan Tuhan-Nya, maupun dengan sesama manusia
2. Memelihara Jiwa (*Hifdzun Nafs*). Allah SWT mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Oleh sebab itu Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lainnya dalam rangka menjamin kehidupan manusia.
3. Memelihara Akal (*Hifdzul Aql*), Allah SWT melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Allah SWT mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal dalam mendapatkan ilmu. Pemeliharaan akal sangat penting karena dengan akalnya manusia dapat berfikir tentang Allah SWT, alam semesta dan dirinya. Adapun hal yang perlu dilakukan orang Islam dalam mencerdaskan akalnya ialah melalui pendidikan.

4. Memelihara Kehormatan dan Keturunan (*Hifdzun Nasl*)  
Memelihara keturunan adalah memelihara jenis kemanusiaan dan menumbuhkan kasih sayang serta saling mencintai diantara manusia. Orang tua dituntut menanamkan keyakinan, ibadah, dan akhlak agar anak selalu terpelihara dengan baik.
5. Memelihara Harta (*Hifdzul Maal*) Memelihara harta dapat dilakukan dengan cara antisipasi terhadap perbuatan yang melanggar aturan seperti mencuri, berjudi, menyogok, dan lain-lainnya.<sup>59</sup>

Dari indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu berdaya jika masyarakat mampu terpenuhinya kebutuhan fisik dan materi saja (memenuhi kebutuhannya sendiri, mampu mensejahterakan masyarakat sekitarnya), melainkan juga terpenuhinya kebutuhan spritual dan juga mampu memenuhi ciri-ciri dari pemberdayaan yang baik. Ciri-ciri program pemberdayaan yang bersifat baik yaitu:

1. Transparan (*transparent*): semua yang terlibat dalam proses tersebut dapat mengetahui perkembangan keuangan yang berjalan.

---

<sup>59</sup> Abdurrahman Kasdi, “*Maqasyid Syari’ah* Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2014), 56-57.

2. Bertanggung Jawab (*accountable*): perhitungan dana dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
3. Menguntungkan (*profitable*): semua pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat khususnya keuntungan materi, baik diterima oleh pihak pelaku pemberdayaan dan juga sasaran pemberdayaannya.
4. Berlanjut (*sustainable*): proses dapat dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang.
5. Dapat diperluas (*replicable*): program ini dapat diterapkan juga ke kelompok di wilayah lainnya.<sup>60</sup>

### C. Kemandirian Pangan

#### 1. Pengertian Kemandirian Pangan

Adriani dan Bambang menjelaskan, pangan adalah Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam sistem ketatanegaraan, upaya peningkatan sumber daya manusia diatur dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap individu berhak sejahtera, dan pelayanan kesehatan adalah salah

---

<sup>60</sup> Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 23.

satu hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian pemenuhan pangan untuk kesehatan warga negara merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).<sup>61</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pada Pasal 1 ayat 1, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>62</sup>

Kemandirian Pangan, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pada Pasal 1 ayat 3 adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan Kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.<sup>63</sup>

Secara konseptual menurut Purwaningsih, kemandirian pangan adalah suatu kondisi dimana tidak terdapat ketergantungan pada siapapun dan tak ada satu pihakpun yang dapat mendikte soal

---

<sup>61</sup> Merryana Adriani Dan Bambang Wirjatmadi, *Pengantar Gizi Masyarakat*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 ), 265.

<sup>62</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, Jakarta, 2012.

<sup>63</sup> Ibid.

pangan, selanjutnya kemandirian mengandung pengertian kemampuan diri sendiri untuk mencukupi kebutuhan pangan. Lebih jauh kemandirian pada akhirnya harus berarti "kejayaan" yang pada dasarnya adalah kemampuan bersaing pada tingkat global. Namun perlu dicatat bahwa kemandirian pangan, tidak berarti menolak ekspor-impor pangan, karena perdagangan internasional yang digunakan untuk mensejahterakan rakyat.<sup>64</sup>

Keanekaragaman hayati sumber pangan di Indonesia yang dapat tumbuh secara baik di Indonesia berdasarkan dengan jenis dan varietas tanaman, serta sumber nutrisi yang dikandung. Yaitu :

1. Karbohidrat : padi-padian ; padi dan jagung, umbi-umbian; singkong, umbi jalar, garut, gayong, talas, kimpul, gembil dan lain-lain.
2. Protein : hewani; ikan air tawar dan ikan laut; ternak; sapi, kerbau, dan kambing, unggas; ayam, itik, bebek. Nabati ; kacang-kacangan
3. Vitamin dan mineral : buah-buahan; pepaya, manga, pisang, jambu, manggis, nanas, dan lain-lain. Sayur-sayuran, palawija, dan kacang-kacangan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Yunastiti Purwaningsih, "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat, *Ekonomi Pembangunan* Vol. 9, No. 1, (Juni 2008), 1.

<sup>65</sup> Anton Djuwardi, *Cassava Solusi Pemberagaman Kemandirian Pangan*, (Jakarta:Grasindo, ) 7.

## 2. Strategi Kemandirian Pangan

Untuk menuju kemandirian pangan mengacu pada lima prinsip Roma yang dihasilkan dari KTT pangan tahun 2009, yaitu :

- a. Melakukan pembangunan melalui pendekatan jalur ganda (*twin track approach*), yaitu dengan menggerakkan seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, LSM, organisasi profesi, organisasi massa, organisasi sosial, dan pelaku usaha) untuk membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian, menyediakan lapangan kerja dan pendapatan atau daya beli, serta memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rwan pangan melalui pemberian bantuan langsung pangan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Melaksanakan koordinasi strategis pada tingkat nasional, regional, dan global untuk meningkatkan pemerintahan (*governance*), memperbaiki alokasi sumberdaya, dan mengidentifikasi senjang dalam melakukan respon terhadap permasalahan.
- c. Menjamin sepenuhnya komitmen berkelanjutan bagi para mitra untuk melakukan investasi di sektor pertanian, ketahanan pangan dan gizi melalui penyediaan sumber daya

yang diperlukan secara tepat waktu dan dengan cara yang handal melalui perencanaan dan program *multiyear*.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Nur Mahmudi Isma'il, *Revolusi Mindset : One Day No Rice.*, 141.